

## Penguatan Kolaborasi dan Sinergi di Level Desa Dalam Menangani Penyebaran Covid-19

Bayu Nurrohman<sup>1\*</sup>, Yeby Ma'asan Mayrudin<sup>1</sup>, M. Dian Hikmawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*Corresponding Email: Bayu.nurrohman@untirta.ac.id

### Abstrak

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) belum menunjukkan angka penurunan yang signifikan, bahkan angka kematian terus meningkat baik secara global, nasional maupun lokal. Hal ini menjadi sangat krusial dan problematik di tengah penyebaran wabah Covid-19 yang massif diperlukan upaya kreatif dari para pemangku kepentingan khususnya pimpinan daerah dan pemerintahan lokal di desa. Sayangnya peran aktor formal dilihat belum optimal dikarenakan tersandung hambatan struktural dan keterbatasan sumberdaya. Meski demikian, aktivisme peran aktor non-pemerintahan baik secara individu maupun komunitas terlihat menunjukkan empati dan solidaritasnya terhadap warga yang terdampak wabah ini. Oleh sebab itu diperlukan suatu rancangan kolaborasi yang efektif untuk mendorong kerja sama antara aktor pemerintahan desa dengan warganya. Program pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk menggali sinergi aparatur desa, pemangku kepentingan (unsur TNI dan Polri), aktor swasta, tokoh agama, tokoh adat dan utamanya pelibatan warga secara massif dalam pengelolaan mitigasi atas pandemi Covid-19. Program ini secara praktik akan melaksanakan forum kolaborasi antar segenap elemen yang ada di level desa untuk mengajukan program taktis pencegahan dan pemetaan wabah Covid-19. Adapun kegiatannya di antaranya adalah pengadaan tenda untuk *check point* bagi warga yang hendak masuk dan keluar dari/ke Desa Pasir Karag dan Desa Sindangsari. Di samping itu, tim juga akan memfasilitasi pengadaan perangkat pendukung yang standar bagi operasi *check point* ini seperti masker, disinfektan, *hand sanitizer*, dan termometer pengecek suhu badan.

**Kata kunci :** Kolaborasi, sinergi, covid-19

**Abstract**

*The Coronovirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has not shown a significant decrease, in fact, the mortality rate continues to increase both globally, nationally and locally. This has become very crucial and problematic in the midst of the spread of the Covid-19 outbreak which is needed by the masses, which requires creative efforts from regional leadership and local government stakeholders in the village. Formal actors are seen as not optimal because they stumble upon structural obstacles and limited resources. However, the activism of the role of non-government actors, both individually and in the community, shows their empathy and solidarity with the residents affected by this epidemic. Therefore, an effective collaborative design is needed to encourage cooperation between village government actors and their citizens. This community service program aims to build synergy among village officials, TNI and Polri stakeholders, private actors, traditional leaders and the main involvement of massive citizens in mitigating management of the Covid-19 pandemic. In practice, this program will implement a collaborative forum between all elements at the village level to propose a tactical program for prevention and mapping of the Covid-19 outbreak. Activities include the provision of tents to check points for residents who enter and leave Pasir Karag and Sindangsari Villages. In addition, the team will also provide standard support equipment for check point operations such as masks, disinfectants, hand sanitizers, and thermometers for checking body temperature.*

**Keywords :** Collaborative, synergy, covid-19

**Pendahuluan**

Pandemi *Coronovirus Disease 2019 (Covid-19)* hingga saat ini belum menunjukkan angka penurunan yang signifikan, bahkan angka kematian terus meningkat baik secara global, nasional maupun lokal. Berdasar pada data resmi pemerintah Indonesia yang dilaporkan di situs [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) tanggal 28 April 2020, Pasien Positif Covid-19 di Indonesia sejumlah 9.511 orang, Pasien Sembuh sejumlah 1.254 orang, dan Pasien Meninggal berjumlah 773 orang.

Maka pertanyaannya adalah apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun lokal seperti pemerintahan desa selaku penanggungjawab urusan publik? Hal tersebut menjadi sangat krusial di tengah penyebaran wabah Covid-19 yang massif diperlukan upaya kreatif dari para pemangku kepentingan khususnya pimpinan daerah dan pemerintahan lokal di bawahnya seperti desa (Supriatna, 2020). Sayangnya peran aktor formal dilihat belum optimal dikarenakan tersandung hambatan struktural dan keterbatasan sumberdaya (Mas'udi & Winanti, 2020).

Meski demikian, aktivisme peran aktor maupun organisasi non-pemerintahan baik secara individu maupun komunitas terlihat menunjukkan empati dan solidaritasnya terhadap warga yang terdampak wabah Covid-19 (Kusnadi & Hikmawan, 2020). Lihat saja mulai dari para konglomerat terkaya di Indonesia, komunitas masyarakat sipil sampai anak sekolah bergotong royong untuk menunjukkan dukungannya kepada

pemerintah, tenaga medis dan para pasien serta masyarakat terdampak pandemi tersebut. Hal tersebut sudah banyak diberitakan dan viral melalui beragam *platform* media (Kusnadi & Hikmawan, 2020).

Namun, situasi objektif di lapangan, khususnya Desa Pasir Karag dan Desa Sindangsari mengalami persoalan-persoalan yang cukup kompleks. Aparatur pemerintahan di level desa dan warga kesulitan dalam perancang program secara taktis dan implementatif dikarenakan keterbatasan struktural dan sumberdaya yang dimilikinya. Kita mengetahui hal itu tidak lain disebabkan tidak eloknya tata kelola pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam memberikan acuan kerja kepada pemerintahan lokal di level desa (Irawan & Faturahman, 2019). Kebijakan yang tidak terintegrasi di level pusat membuat cukup banyak kepala desa melakukan kritik karena dinilai membuat kebijakan yang berubah-ubah. Salah satunya kasusnya seperti kebijakan relokasi dan realokasi penganggaran APBDes untuk penanganan wabah Covid-19. Adapun dari sisi aktivisme warga desa pun masih mengalami problem. Hal itu disebabkan karena belum luasnya kesadaran dari kebanyakan elemen di level desa tentang urgensinya kolaborasi dan sinergi antara semua pihak dalam perang melawan wabah tersebut.

Program pengabdian pada masyarakat ini menjadi penting untuk dikerjakan karena memiliki nilai moral dan solidaritas sosial dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat di level desa mengenai pentingnya penguatan kolaborasi pencegahan penyebaran Covid-19 dan mencanangkan model pencegahan penyebaran wabah tersebut dengan memfasilitasinya pengadaan *check point* dan perangkat pendukungnya seperti pengadaan tenda untuk *check point* bagi warga yang hendak masuk dan keluar dari/ke Desa Pasir Karag dan Desa Sindangsari. Di samping itu, tim juga akan memfasilitasi pengadaan perangkat pendukung yang standar bagi operasi *check point* ini seperti masker, disinfektan, *hand sanitizer*, dan termometer pengecek suhu badan. Dan sebagai manifestasi Tridharma Perguruan Tinggi dan axiologi dari visi misi UNTIRTA untuk berperan sebagai *supporting systems* bersama-sama dengan masyarakat dalam mendukung secara massif dan efektif dalam penanganan penyebaran pandemi ini.

Dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam penguatan kolaborasi dan sinergitas untuk penanggulangan covid-19, kami menggunakan konspeksi dari (Emerson, and Nabatchi, 2015) menawarkan definisi yang integratif tentang collaborative governance yaitu sebuah program dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang memungkinkan orang untuk terlibat melintasi batas. selain itu juga memperkenalkan apa yang disebut sebagai rezim collaborative governance yang berupa system pengambilan keputusan publik melibatkan kolaborasi lintas batas yang mewakili pola-pola yang ada dari perilaku dan aktivitas (Kusnadi, 2019).

Untuk menggambarkan proses dan komponen-komponen yang terlibat (Emerson, and Nabatchi, 2015) menggambarkan sebuah kerangka kerja integratif yang berbentuk oval, sebagai kritik atas tulisan mereka sebelumnya yang berbentuk lingkaran bergerigi yang dianggap tidak dinamis dan terkesan kaku (Donahue & Zeckhauser,

2011), tidak bisa menggambarkan bagaimana alur pengaruh dan mempengaruhi dari apa yang disebut drive di dalam kerangka collaborative governance (Hikmawan et al., 2020). Selain itu kolaborasi juga menjadi penunjang dalam menanggulangi permasalahan Covid-19 dengan saling mengandalkan satu sama lain untuk mencapai tujuan (Hikmawan et al., 2020).

## **Metode**

Menurut Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM, 2018), pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal. Untuk bisa mencapai tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat perlu adanya metode yang tepat dalam melaksanakannya di Desa sebagai objek dari pengabdian masyarakat.

Dalam menentukan permasalahan prioritas mitra, dalam hal ini adalah Desa Sindangsari di Kabupaten Serang dan Desa Pasir Karag di Kabupaten Pandeglang, kami melakukan beberapa langkah sesuai dengan ketentuan kegiatan pengabdian masyarakat di Untirta (LPPM, 2020) yang meminta diadakannya observasi dan wawancara kepada Aparatur dan Masyarakat Desa untuk mengetahui kondisi awal Desa. Kegiatan di Desa diantaranya melakukan observasi awal ke lapangan untuk mengetahui kondisi terkini yang dialami oleh Desa Sindangsari dan Desa Pasir Karag pada saat pandemic Covid ini berlangsung. Selain observasi, kami juga melakukan wawancara untuk mengetahui kebutuhan yang mitra sangat prioritaskan untuk dipenuhi pada saat ini. Dari hasil observasi dan wawancara, kami mendapatkan beberapa permasalahan prioritas yang sampai dengan saat ini kami dan mitra masih terus berdiskusi dan berkoordinasi mengenai kondisi penanganan Covid-19 di Desa Sindangsari dan Desa Pasir Karag.

Permasalahan yang pertama adalah bahwa aparaturnya pemerintahan di level desa dan warga kesulitan dalam merancang program secara taktis dan implementatif dikarenakan keterbatasan struktural dan sumberdaya yang dimilikinya. Desa tentu sebagai daerah otonom terkecil memiliki peran yang besar dalam menggerakkan masyarakat karena mereka adalah garda terdekat dalam menghimbau warga untuk menaati kebijakan dalam penanggulangan Covid-19, namun masalah yang selalu muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas untuk dapat membuat program dan menjalankannya kaitan dengan Covid-19.

Permasalahan kedua adalah aparaturnya pemerintahan kesulitan dalam melakukan relokasi dan realokasi penganggaran APBDes untuk penanganan wabah Covid-19. Sebetulnya hal ini kembali pada masalah sumber daya manusia, kekhawatiran akan dampak hukum menjadikan aparaturnya Desa sulit dalam merelokasi APBDes guna menunjang penanganan Covid-19.

Permasalahan ketiga adalah belum luasnya kesadaran dari kebanyakan elemen di level desa tentang urgensinya kolaborasi dan sinergi antara semua pihak dalam perang melawan wabah tersebut. Tentu masalah kesadaran individu sangat penting dalam

menghadapi wabah ini, edukasi sangat perlu untuk mempercepat sinergi dan kolaborasi untuk menghadapi Covid-19.

Menanggapi beberapa permasalahan yang ada pada mitra Pemerintahan Desa dan segenap elemen di dalamnya sebenarnya punya potensi untuk melakukan penguatan kolaborasi dan sinergi di masa pandemi ini, maka dengan dukungan dari tim Untirta akan mampu mendorong terwujudnya praktik taktis dan bergotong royong secara efektif.

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh mitra, kami akan melakukan pendekatan yang deskriptif dan fenomenologis agar bisa menghasilkan sebuah solusi yang bisa dijalankan dengan baik oleh mitra. Dalam menyelesaikan permasalahan mitra, kami akan selalu melakukan koordinasi dan diskusi dengan mitra, hal ini penting karena dengan adanya forum diskusi kami akan saling mengenal dan mengetahui kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh mitra dan bagaimana caranya untuk bisa program yang ada diterima dan dijalankan oleh mitra dan warganya.

Selain koordinasi dan diskusi, kami juga melakukan pendekatan secara langsung dengan membuat tenda check point yang akan dibuat di perbatasan Desa mitra. Hal ini menjadi wujud nyata disamping adanya diskusi dan koordinasi. Adanya tenda check point akan menandai adanya kolaborasi diantara seluruh stakeholder Desa dalam memerangi Covid-19. Aparatur Desa, tenaga kesehatan, babinsa, dan pihak lain bisa menggunakan tenda check point sebagai posko untuk mendiskusikan sesuatu atau bekerja sama dalam menanggulangi Covid-19.

Mitra bertindak sebagai pengguna program pengabdian masyarakat yang telah kami canangkan. Mitra dalam hal ini Desa Sindangsari dan Desa Pasir Karag harus mampu menggunakan tenda check point dengan semaksimal mungkin untuk menekan angka penyebaran virus corona ini masuk ke Desa. Partisipasi mitra sangat dibutuhkan agar program ini berhasil, apalagi mengingat gelombang mudik akan datang sekalipun pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik, tapi kejadian terdahulu dalam pandemic ini selalu membuktikan bahwa masyarakat tidak semua bisa mematuhi instruksi dari pemerintah.

### **Hasil dan Diskusi**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan di Desa Pasir Karag dan Desa Sindangsari berkaitan dengan penguatan kolaborasi dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 menghasilkan beberapa output yang bisa dimanfaatkan oleh pihak desa. Hasil yang telah kami capai pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pertama adalah Kegiatan Penyuluhan dengan tema "*Penguatan Kolaborasi dan Sinergi di Level Desa dalam menangani Penyebaran Covid-19*". Acara ini dihadiri oleh 20 undangan dari pihak desa, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan organisasi pemuda, RT dan juga RW. Acara ini juga dihadiri oleh Camat Koroncong yang sekaligus membuka acara ini. Dalam acara ini kami memberikan beberapa konsepsi dalam upaya memperkuat kolaborasi diantara pemangku kepentingan di pihak desa. Undangan pada acara ini juga merupakan perwakilan dari beberapa tokoh masyarakat

dan pihak yang terkait sehingga informasi yang didapatkan dari penyuluhan ini bisa dengan cepat didistribusikan kepada masyarakat yang lainnya. Penyuluhan ini menitikberatkan kepada Desa agar dalam penanggulangan perlu adanya kolaborasi diantara seluruh stakeholder yang ada di Desa. Pemerintah Desa yang dikepalai oleh kepala desa sebagai kepala tim satuan tugas penanggulangan covid-19 di tingkat desa perlu berkolaborasi dengan pihak lain seperti akademisi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat desa, babinsa dan kamtibmas dalam membantu menertibkan warga untuk tetap patuh pada protocol kesehatan di masa pandemi, tokoh masyarakat agar bisa memberikan pengaruh dan titahnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kesehatan, tokoh pemuda untuk menggerakkan warga agar tetap patuh, juga masyarakat desa untuk lebih bisa saling menjaga sesama warga agar bisa menekan angka covid-19 di tingkat desa. Dengan adanya kolaborasi yang dilakukan seperti ini, maka penyebaran covid-19 di tingkat desa bisa dikendalikan (Kusnadi & Hikmawan, 2020). Edukasi seperti ini yang kami lakukan pada penyuluhan agar bisa memberikan gambaran kepada Desa tentang pentingnya mekanisme kerja dengan model kolaborasi saat ini (Farazmand, 2012).

Setelah melakukan penyuluhan, kami melaksanakan pemberian beberapa peralatan dalam upaya penanggulangan penyebaran virus corona. Adapun barang-barang yang kami berikan adalah tenda untuk Check Point PSBB berukuran 3x3 yang disimpan di perbatasan Desa untuk mencegah keluar dan masuknya orang-orang secara bebas yang berpotensi membawa virus corona. Tenda ini merupakan aspirasi yang menjadi prioritas dari Pihak Desa karena mereka merasa khawatir kasus positif yang belum bisa dikendalikan akan masuk ke wilayah Desa apabila tidak dikontrol di daerah perbatasan yang pasti aktivitas keluar masuk masyarakat sangat tinggi. Pemberian lainnya adalah Masker kesehatan sebanyak 500 buah yang akan didistribusikan oleh Kepala Desa ke setiap Dusun melalui RT dan RW, juga akan disimpan di Tenda Check Point untuk memberikan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakannya. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker ini pun masih perlu ditingkatkan, maka pemberian masker adalah salah satu upaya kepada masyarakat dalam menggunakan masker.

Hand Sanitizer juga kami distribusikan sebanyak 250 buah yang akan disebarakan oleh Kepala Desa ke setiap Dusun melalui RT dan RW, juga akan disimpan di Tenda Check Point untuk memberikannya kepada masyarakat yang tidak memilikinya. Lalu yang terakhir adalah pemberian Thermo gun sebanyak 2 buah disimpan di tenda check point untuk mengecek suhu masyarakat yang akan masuk ke Desa Pasir Karag dan 1 Paket mebeleur untuk disimpan di Tenda check point. Adanya pemberian peralatan penunjang kepada Desa agar Desa lebih maksimal menerapkan aturan protocol kesehatan di masa pandemi. Tanpa adanya fasilitas penunjang, akan sulit tentunya bagi Desa untuk membuat warganya patuh. Keberadaan fasilitas juga akan menambah sumber daya Desa agar bisa melaksanakan penanggulangan covid-19 dengan lebih maksimal.

Dengan adanya penyuluhan tentang penguatan kolaborasi dan ditunjang dengan peralatan yang memadai dalam pencegahan Covid-19, kami meyakini upaya dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 akan bisa dilaksanakan dengan lebih baik dari sebelumnya. Kepemimpinan kepala Desa, kerjasama diantara pemangku kepentingan, dan kesadaran masyarakat juga sangat berpengaruh dalam teraksananya upaya pencegahan ini, maka perlu upaya dari segala pihak agar mampu berkolaborasi dalam upaya pencegahan virus ini.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang kami laksanakan di Desa Pasir Karag dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 diantara pihak desa, masyarakat, dan pihak kemandirian di Desa seperti babinsa dan kamtibmas. Pelaksanaan pengabdian diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam upaya penanggulangan Covid-19. Saran yang bisa kami berikan adalah Pihak Desa Pasir Karag agar bisa memanfaatkan produk pengabdian dengan sebaik-baiknya agar penyebaran virus corona bisa ditanggulangi dan dikendalikan di wilayah Desa Pasir Karag. Koordinasi dan sinergitas agar dijalin lebih kuat diantara pihak desa, masyarakat, dan pihak kemandirian di Desa seperti babinsa dan kamtibmas agar penanggulangan virus bisa efektif dilakukan.

### **Ucapan Terimakasih**

Jurnal pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu luaran dalam skim hibah pengabdian masyarakat yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.

### **References**

- Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). *Collaborative Governance*. Princeton University Press.
- DRPM. (2018). *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII*. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti.
- Emerson, and Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Farazmand, A. (2012). *Sound Governance : Engaging Citizens through Collaborative Organizations*. 223-241. <https://doi.org/10.1007/s11115-012-0186-7>
- Hikmawan, M. D., Hamid, A., Nurrohman, B., Ramadhan, G., & Mayrudin, Y. M. (2020). *Collaborative Governance Model on Agricultural Business in Banten, Indonesia*. 6(2), 176-201. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.3>

- Irawan, A., & Faturahman, B. M. (2019). Public Services Motivation (PSM) in One Stop Integrated Services in Merauke Regency. *Journal of Governance*, 4(2), 156–170.  
<https://doi.org/10.31506/jog.v4i2.6569>
- Kusnadi, I. H. (2019). Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi , Informasi dan Edukasi ( KIE ) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang. *International Journal of Demos*, 1(2), 204–231.
- Kusnadi, I. H., & Hikmawan, M. D. (2020). Digital cohesion in era of pandemic COVID-19 in Indonesia. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 13(7), 1775–1779.
- LPPM. (2020). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Internal Untirta 2020*. Untirta.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (Eds.). (2020). *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Supriatna, E. (2020). Socio-Economic Impacts of the COVID-19 Pandemic: The Case of Bandung City. *Journal of Governance*, 5(1), 61–70.  
<https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.8041>